

PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MISKIN DALAM PERSPEKTIF ISLAM (STUDI KASUS DI KELURAHAN GEMPENG KECAMATAN BANGIL)

M. Subari

Sekolah Tinggi Agama Islam Pancawahana Bangil, Indonesia

Abstract: The term community empowerment trending among the public, and the bureaucrats, not everyone understand in the implementation in the community. The word empowerment has a very broad sense for the empowerment of implementation, there is a learning process and habituation. Before the economic empowerment of the poor need to be given small micro business skills training, changing behavior and thought patterns as well as insight into the future of simple interpreneurship before capital by small micro enterprises. Poverty and hunger that is a great danger for humanity. Not a few people who fall civilization only because of indigence. In fact, the Prophet Muhammad said in a hadith "pauperism was approached kufir". Islam is actually very stressed values of justice and economic equality. Is not one of the pillars of Islam is zakat, he is a symbol of equality and economic empowerment of Islam. In Islam the passages about the economic management people already revealed to the Prophet Muhammad when he was in Makkah. To direct people aqidah and beliefs as well as a pillar of the economy of the people.

Keyword: Empowerment, economy, the poor, an islamic perspective.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan persoalan struktural dan multi dimensional, mencakup politik, sosial, ekonomi, aset, dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari dimensi-dimensi kemiskinan tersebut muncul dalam berbagai bentuknya, seperti antara lain:

1. Dimensi politik, sering muncul dalam bentuk tidak dimilikinya wadah organisasi yang mampu memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat miskin, sehingga mereka benar-benar tersingkir dari proses pengambilan keputusan penting yang menyangkut diri mereka. Akibatnya, mereka juga tidak memiliki akses yang memadai ke berbagai sumberdaya kunci yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan hidup mereka secara layak, termasuk akses informasi.
2. Dimensi sosial, sering muncul dalam bentuk tidak terintegrasikannya masyarakat miskin ke dalam institusi sosial yang ada dan terinternalisasikan budaya kemiskinan yang merusak kualitas manusia dan etos kerja mereka.
3. Dimensi ekonomi, muncul dalam bentuk rendahnya penghasilan sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sampai batas yang layak.
4. Dimensi aset, ditandai dengan rendahnya kepemilikan masyarakat miskin ke berbagai hal yang mampu menjadi modal hidup mereka, termasuk fase kualitas sumberdaya manusia, peralatan kerja, modal, dan sebagainya.

Karakteristik kemiskinan seperti tersebut di atas dan krisis ekonomi yang terjadi telah menyadarkan semua pihak bahwa pendekatan dan cara yang dipilih dalam penanggulangan kemiskinan selama ini perlu diperbaiki, yaitu kearah pengokohan kelembagaan masyarakat. Keberdayaan kelembagaan masyarakat ini dibutuhkan dalam rangka membangun organisasi masyarakat yang benar-benar mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin, yang mandiri, berkelanjutan dalam menyuarakan aspirasi serta kebutuhan mereka dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik di tingkat lokal, baik dari aspek sosial, ekonomi maupun lingkungan. Penguatan organisasi masyarakat yang dimaksud juga dititikberatkan pada upaya pengokohan perannya sebagai motor penggerak dalam “melembagakan” dan “membudayakan” kembali nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan sebagai nilai-nilai utama yang melandasi aktivitas penanggulangan kemiskinan oleh masyarakat sendiri di kelurahan mereka, sehingga diharapkan tidak ada lagi kelompok masyarakat yang masih terjebak dalam lingkaran kemiskinan, yang pada gilirannya antara lain diharapkan juga dapat tercipta lingkungan kota dengan perumahan yang lebih layak huni didalam pemukiman yang lebih responsif, dan dengan system sosial masyarakat yang lebih mandiri melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Model tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi penyelesaian persoalan kemiskinan yang bersifat multi dimensial dan struktural. Khususnya yang terkait dengan dimensi pendidik, ekonomi serta dalam jangka panjang mampu menyediakan aset yang lebih baik bagi masyarakat miskin dalam meningkatkan pendapatannya maupun menyuarakan aspirasinya dalam proses pengambilan keputusan. Kepada organisasi masyarakat warga yang di bangun oleh dan untuk masyarakat, selanjutnya dipercaya untuk mengelola dana abadi penanggulangan kemiskinan secara partisipatif, transparan dan akuntabel. Dana tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membiayai kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan baik berbentuk kredit mikro maupun (dana bergulir) maupun hibah untuk kegiatan yang bermanfaat oleh masyarakat, contoh untuk perbaikan atau pemugaran rumah tidak layka huni.¹

Kemiskinan sebagai bentuk ancaman dan merupakan masalah besar yang telah ada sejak sulu sampai sekarang terutama bagi negara yang berpenduduk mayoritas islam. Pertanyaannya maukah umat islam menaggulangi kemiskinan dan maukah orang miskinnya itu untuk bergerak dan merubah nasib dari tidak berdaya menjadi berdaya. Menurut mufasir Al – Qur’an Muhammad Quraish Shihab melihat dari akar kata “miskin” berarti diam atau tidak bergerak, maka dapat diperoleh pesan, faktor utama penyebab kemiskinan adalah sikap berdiam diri, enggan atau tidak dapat bergerak dan berusaha.²

1. Direktorat Jenderal Perumahan dan Pemukiman, Pedoman Umum P2KP II Cetakan Pertama, TS, 2002, Hal 1-2

2. Muhammad Quraish Shihab, Tafsir Al – Qur’an, hal 382

Keengganan berusaha adalah penganiayaan diri sendiri. Berarti tidak mau berubah dalam arti tidak mau merubah nasibnya sendiri. Hal ini sangat bertentangan dalam ajaran islam. Allah SWT tidak akan merubah nasib seseorang kalau dirinya sendiri tidak ada upaya atau ikhtiyar untuk merubah dirinya sendiri.³ Sedangkan ketidakmampuan berusaha antara lain disebabkan oleh penganiayaan manusia lain. Ketidakmampuan berusaha yang disebabkan orang lain diistilahkan pula dengan kemiskinan struktural. Lebih jelas lagi, jaminan rizqi yang dijanjikan Allah SWT ditujukan pada makhluk yang dinamakan *dabbah*, arti harfiyahnya bergerak. Hal ini sesuai dengan ayat Al – Qur'an yang artinya “apa saja yang melatah diatas bumi rizqi dijamin Allah SWT.”⁴

Berdasarkan hal tersebut di atas kaum muslimin mempunyai kewajiban untuk memberdayakan masyarakat miskin baik secara kolektif maupun induktif. Penanggulangan kemiskinan di lakukan dengan memberdayakan masyarakat butuh peran dan dukungan yang memadai dari pelaku-pelaku pembangunan lokal lainnya seperti pemerintah daerah, dunia usaha, kelompok peduli, LSM, professional, perguruan tinggi, Ulama'. Dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang menjadi ujung tombak adalah kegiatan ekonomi di wujudkan dengan kegiatan pinjaman bergulir, yaitu pemberian pinjaman dalam skala mikro pada masyarakat miskin yang mempunyai usaha mikro kecil atau masyarakat miskin yang akan berusaha di wilayah kelurahan atau desa dimana BKM/LKM berada dengan persyaratan dan ketentuan yang telah di tetapkan.

PEMBAHASAN

1. Penggolongan Kemiskinan

Pada hakikatnya pengelompokan kemiskinan dapat digolongkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu pertama kemiskinan struktural keadaan miskin yang disebabkan oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan perbuatan manusia, misalnya pemerintahan yang otoriter dan meliteristik, pengelolaan keuangan publik yang sentralistik, merajalelannya praktek korupsi kolosi dan nepotisme (KKN) kebijakan ekonomi yang tidak adil serta perekonomian dunia yang lebih menguntungkan kelompok Negara tertentu. Kelompok yang kedua kemiskinan natural, yaitu keadaan miskin yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah baik yang berkaitan dengan sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang mengitarinnya, misalnya faktor ekstern kesuburan tanah dan bencana alam. Kelompok yang ketiga adalah kelompok kemiskinan yang kultural adalah keadaan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang tertentu yang melekat dalam kebudayaan masyarakat terutama yang menyebabkan terjadinya proses pelestarian kemiskinan dalam masyarakat itu

3 Kemenag, RJ, Terjemah Al – Qur'an hal 609

4 Kemenag, RJ, Terjemah Al – Qur'an hal 709

sendiri, misalnya kecenderungan untuk hidup boros, kurang menghargai waktu dan kurang minat untuk berprestasi.⁵

2. Penyebab Terjadinya Kemiskinan

Beberapa penyebab terjadinya kemiskinan antara lain adalah: 1) pelaksanaan suatu kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat miskin, 2) ekonomi dikuasai kelompok tertentu terjadinya korupsi, kolasi, dan nepotisme (KKN) pada pemegang kebijakan⁶, 3) kaum muslim yang wajib mengeluarkan zakat enggan mengeluarkan zakatnya, 4) tidak ada pengelolaan zakat dan shodaqoh dari konsumtif menjadi produktif, 5) tidak ada kepedulian pihak lain untuk memberdayakan masyarakat miskin⁷

3. Kriteria Kemiskinan

Kriteria kemiskinan di Indonesia berbeda-beda, kriteria yang dikeluarkan oleh PBS, BKKBN Dinkes sangat berbeda-beda, apalagi kriteria kemiskinan yang disepakati oleh masyarakat di kelurahan atau desa yang ada P2KP, PNPM nya tergantung kesepakatan masyarakat setempat yang disepakati dalam rembuk refleksi kemiskinan berbeda sama sekali dengan kriteria kemiskinan dalam agama islam yang disebutkan dalam Al –Qur'an surat Taubat ayat 60 yang artinya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, para pengurus zakat, para muallaf, untuk merdekakan budak, orang-orang yang sedang dalam perjalanan.⁸ Dalam ayat tersebut jelas kriteria kemiskinan yang pertama adalah fakir, baru miskin karena orang fakir itu lebih parah daripada orang miskin kondisinya. Kemudian kebutuhan pokok makan sehari 1 mut (6 ons) dan makan ikan dan daging 1 minggu 2 kali kalau kurang dari itu termasuk orang miskin.

4. Tahapan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan

Dalam tahapan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang harus di persiapkan adalah pembentukan Lembaga Keswadayaan Masyarakat yang anggarannya dari relawan-relawan yang punya kepedulian dengan masalah kemiskinan. Relawan-relawan yang menggerakkan orang-orang fakir dan miskin.

Dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di tingkat desa atau kelurahan yang selalu mendampingi dan mendidik mengarahkan dan memberdayakan masyarakat fakir miskin dengan merubah meminsit orang fakir dan miskin dari mental malas, tidak mau bekerja, atau mental pengemis menjadi mental pekerja keras, mental pengusaha, kreatif, dan inovatif. Ini tidak mudah seperti membalikkan tangan, jadi butuh pendamping yang ulat, sabar, kreatif, inovatif, dan mempunyai keahlian khusus yaitu pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, interpreneurship, agama. Yang dimaksud dapat selau mendampingi masyarakat fakir dan miskin di tingkat desa atau kelurahan adalah pendamping atau fasilitator kualifikasi pendamping atau

5 Direktorat Jenderal Perumahan dan Pemukiman Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)

6 Dirjen Cipta Karya, Pedoman Pelaksanaan PNPM MP, hal 12

7Jauzi Syafi'i, Zakat Pemberdayaan Masyarakat Miskin, hal 9

8Jam'iyatul Qurra' Wal Huffazh, Al –Qur'an dan Terjemahnya hal 187

fasilitator yaitu sarjana S1 segala jurusan yang diharapkan mempunyai keahlian ekonomi, entrepreneurship, agama, pemberdayaan masyarakat.⁹

Pendekatan yang digunakan adalah dengan mengarahkan kegiatan pinjaman bergulir sebagai akses pinjaman untuk masyarakat miskin yang saat ini belum mempunyai akses pinjaman.

- a. Kegiatan pinjaman bergulir dilaksanakan ditingkat desa atau kelurahan secara profesional untuk menjaga keberlangsungan akses pinjaman bagi masyarakat miskin.
- b. Transparansi atas pengelolaan dan kinerja UPK serta monitoring partisipatif oleh warga masyarakat sebagai wujud pertanggung jawaban pengelolaan dana masyarakat.
- c. Penyediaan akses pinjaman yang jumlahnya maupun tingkat bungannya atau jasanya hanya menarik bagi kelompok masyarakat miskin.
- d. Menggunakan sistem tanggung renteng kelompok sebagai alat kontrol pengelola (UPK) maupun kelompok peminjam (KSM).
- e. Meningkatkan kapasitas kewirausahaan dan pembukuan sederhana.

Beberapa prinsip dasar dalam pemberian pinjaman bergulir yang perlu mendapat perhatian dari LKM atau UPK antara lain adalah:

- a. Dana yang dialokasikan untuk kegiatan pinjaman bergulir adalah milik masyarakat desa atau kelurahan sasaran dan bukan milik perorangan.
- b. Tujuan dipilihnya kegiatan pinjaman bergulir adalah dalam rangka membentuk program penanggulangan kemiskinan dan oleh karenanya harus menjangkau warga masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran utama.
- c. Pengelolaan pinjaman bergulir berorientasi kepada proses pembelajaran untuk menciptakan peluang usaha dan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat miskin, serta kegiatan-kegiatan produktif lainnya.
- d. Pengelolaan pinjaman bergulir dipisahkan antara LKM atau BKM sebagai representasi dari warga masyarakat pemilik modal dengan UPK sebagai pengelola kegiatan pinjaman bergulir yang bertanggung jawab langsung kepada LKM atau BKM.
- e. Prosedur serta keputusan pemberian pinjaman harus mengikuti prosedur pemberian pinjaman bergulir standar yang ditetapkan.
- f. Manager dan petugas UPK harus orang yang mempunyai kemampuan dan telah memperoleh sertifikat pelatihan dasar yang diadakan oleh program penanggulangan kemiskinan.
- g. UPK telah mempunyai sistem pembukuan yang standar dan sistem pelaporan keuangan yang memadai.
- h. UPK mendapat pengawasan baik oleh LKM atau BKM melalui pengawas UPK yang ditunjuk oleh LKM atau BKM.

9 Direktorat Jenderal Cipta Karya, Pedoman Pelaksanaan Pinjaman Bergulir, Jakarta, 2008, Ha;l 7

Pendampingan pada BKM atau UPK atau KSM. Pendamping atau fasilitator bertugas untuk:

- a. Menjaga prproses agar sesuai dengan tujuan, strategi prinsip pengelolaan pinjaman bergulir.
- b. Mendorong proses pembelajaran bagi masyarakat miskin dalam hal penciptaan peluang usaha dan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan mereka serta kegiatan produktif lainnya.

Mendorong proses pembelajaran bagi pengelola pinjaman bergulir agar dana yang berupo modal usaha dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin.

Penanggulangan kemiskinan pada hakikatnya bisa dilakukan secara individu dan dapat juga melibatkan orang lain. Hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW pada suatu hari ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW untuk mengadukan tentang kefakiran dan kemiskinannya. Dia menceritakan tidak punya penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya setiap hari. Rasulullah SAW memberikan solusi pada sahabat yang mengadukan tentang fakir dan kemiskinannya. Lalu Rasulullah SAW menyuruh sahabat yang ada disamping Rosul untuk mengambil kapak di rumah Rosul, kemudian kapak itu diberikan kepada orang yang mengadukan kemiskinannya tadi, lantas orang yang mengadukan kemiskinan tadi bertanya kepada Rasulullah SAW “untuk apa kapak ini ya Rosul?” dan Rosul menjawab “kapak ini kamu bawa ke hutan untuk mencari kayu bakar, setelah dapat kayu bakar kamu bawa ke pasar untuk kamu jual sehingga mendapat uang, uang tersebut kamu belikan makanan kamu bawa pulang ke rumah untuk keluargamu, dan setiap hari kamu bisa melakukan itu”.¹⁰

Dari contoh praktis dilakukan oleh Rosulullah SAW, jika dalam menanggulangi kemiskinan orang miskin tidak diberi uang, tidak diberi makanan tapi diberi kapak sebagai modal kerja dan usaha. Karena Rosulullah SAW tahu bahwa orang yang mengadukan kemiskinannya mempunyai poptensi atau *skill* berupa tenaga untuk usaha. Sehingga dengan modal kapak tersebut dia bisa bekerja mencari kayu bakar kemudian kayu bakar tersebut di jual di pasar sehingga mendapat uang. Uang tersebut bisa dibelikan makanan untuk keluarganya. Otomatis selesai kemiskinannya dapat pekerjaan tetap dan punya penghasilan tetap, serta bisa memberikan makanan kepada keluarganya setiap hari.

5. Pengertian Badan Keswadayaan Masyarakat

Badan keswadayaan masyarakat (BKM) adalah forum masyarakat dan pengambilan keputusan tertinggi warga masyarakat setempat yang berhak menilai rencana putusan kegiatan-kegiatan yang mencakup dalam jenis kegiatan penanggulangan kemiskinan sebagai konsep generik BKM dapat berupa lembaga masyarakat yang ada, yang berfungsi dan diterima secara meluas dalam masyarakat.

6. Pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat

10. Masbahul Munir, Perpecahan Masalah Kemiskinan Zaman Rosul SAW, Surabaya, Dona, 2008, Hal 10

Tahapan pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) pertama dibentuk panitia di tingkat desa atau kelurahan. Panitia ini bertugas melaksanakan (panitia pemilu BKM) penyaringan utusan di tingkat basis atau RT, dan melibatkan ketua RT setempat untuk memilih utusan di tingkat RT 3 orang untuk di calonkan dan dipilih menjadi anggota Badan Keswadayaan Masyarakat ditingkat desa atau kelurahan panitia pemilu BKM berkewajiban untuk merekap siapa utusan yang dipilih ditingkat RT menjadi jumlah utusan seluruh RT di desa atau kelurahan. Untuk selanjutnya panitia pemilu BKM melaksanakan pemilihan anggota BKM dengan cara semua nama utusan yang direkap dan ditempel oleh panitia berhak dipilih dan memilih diantara nama-nama utusan yang terancam dalam rekap daftar nama utusan atau calon yang ditempel di depan. Cara memilih setiap utusan atau calon punya hak memilih 3 orang nama yang berbeda diantara daftar nama calon dan tidak boleh 1 calon atau utusan memilih 3 nama calon yang sama harus berbeda, sehingga nanti siapa yang namanya terpilih dengan suara terbanyak akan jadi BKM. Dan sebelum pemilihan anggota BKM panitia supaya mengumumkan atau memberitahukan dan wawasan bahwa:

- a. Yang terpilih menjadi anggota BKM tidak dapat gaji harus ikhlas mencari ridho Allah SWT untuk menanggulangi kemiskinan. Hal ini sesuai dengan (Surat Al-Maa'un ayat 1-3) yang artinya "tahukah kamu orang yang mendustakan agama maka dia itulah (orang-orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan) dirinya atau orang lain memberi makan orang miskin.
- b. Mempunyai kepedulian terhadap nasib orang miskin.
- c. Jujur dalam mengemban amanah.
- d. Pandai dan kreatif serta inovatif.
- e. Pinter, kober, bender (PKB).
- f. Berniat untuk beribadah dalam menanggulangi kemiskinan.

Agar anggota BKM yang terpilih betul-betul orang yang ikhlas mau bekerja dan bekerja di niati ibadah mencari ridho Allah SWT. Berdasarkan hasil perolehan suara di rangking perolehan suara yaitu yang menjadi anggota BKM sekaligus siapa yang perolehan suaranya yang paling banyak menjadi kordinator BKM.

Selanjutnya semua anggota BKM mempunyai tugas dan bekerjasama dengan ketua RT sejumlah RT yang ada di desa atau kelurahan melaksanakan pemetaan swadaya masyarakat mencari orang miskin ditingkat RT di desa atau kelurahan sehingga ketemu dan diketahui secara dan akurat jumlah orang fakir miskin di satu desa atau kelurahan sebelum melaksanakan pemetaan swadaya masyarakat (metani atau mencari orang fakir miskin di tingkat RT. di sepakati oleh BKM dan RT bahwa kriteria orang fakir miskin. Adapun kriteria adalah sebagai berikut:

- a. Orang fakir yaitu orang yang tidak mempunyai penghasilan dan tidak punya pekerjaan tetap.
- b. 2. Orang miskin yaitu orang yang mempunyai pekerjaan dan punya penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.

- c. 3. Orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar pada umumnya (sandang, pangan, papan).
- d. Tidak bisa makan sehari tiga kali.
- e. Tidak mempunyai tempat tinggal Yang tetap atau punya tempat tinggal warisan dari orang tua atau orang lain tapi tidak punya penghasilan.
- f. Kebutuhan pokok makan satu hari 1 mut (6 ons) dan makan daging satu minggu 2 kali kalau kurang dari itu termasuk muslim.

Setelah diketahui satu desa atau kelurahan jumlah penduduk fakir miskin, lalu dikelompokkan orang fakir miskin yang masih umum produktif atau mempunyai potensi yang dapat diberdayakan (yang punya potensi keterampilan, usaha, skill dll) kemudian dibentuk kelompok-kelompok berdasarkan potensi yang mereka miliki. Setiap kelompok beranggotakan minimal 3 orang maksimal 5 orang sesuai dengan potensi yang mereka miliki atau dikenal dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) mereka mengelompokkan diri dengan jenis dan potensi atau jenis usaha mikro kecil, jasa, dll.

Setelah itu mereka diberi modal kerja berupa pinjaman bergulir pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir bertujuan untuk menyediakan akses layanan keuangan kepada rumah tangga miskin dengan pinjaman mikro kecil berbasis pasar untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka dan membelajarkan mereka dalam hal mengelola pinjaman dan menggunakannya secara benar.

Sasaran utama pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir adalah rumah tangga miskin berpendapatan rendah di wilayah desa atau kelurahan, khususnya masyarakat miskin yang sudah diidentifikasi dalam daftar masyarakat miskin. Dana pinjaman bergulir di kelola oleh Unip Pengelolaan Keuangan (UPK) yang amanah yang di bentuk oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LKM atau BKM) di tingkat desa atau kelurahan.

7. Sasaran

Sasaran utama dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan adalah rumah tangga yang tergolong fakir dan miskin di wilayah kelurahan atau desa, khusus masyarakat fakir dan miskin yang diidentifikasi dalam daftar masyarakat fakir dan miskin produktif yang dapat diberdayakan.¹¹

8. Pendanaan

Pendanaan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat kelurahan atau desa bias diambil dari dana hibah dari pemerintah, dana dari zakat dan shadaqah, CSR nya perusahaan, dermawan yang punya kepedulian. Orang fakir dan orang miskin akan diberdayakan dengan diberi dana untuk modal usaha mikro kecil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode studi kasus penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Gempeng Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan yaitu Kelurahan Gempeng Kecamatan Bangil dianggap berhasil

¹¹Direktorat Jenderal Cipta Karya, Pedoman Pelaksanan Kegiatan Pinjaman Bergulir, hal 4

melaksanakan program penanggulangan kemiskinan terutama dalam menjalankan dana bergulir untuk orang miskin dari tidak mempunyai modal usaha sampai berdaya mempunyai modal usaha sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin.

HASIL PENELITIAN

Sebagai contoh studi kasus di kelurahan Gempeng Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Pertama, Pak Sariman seorang keluarga fakir yang tidak punya pekerjaan tidak mempunyai mata pencarian untuk nafkah keluarganya tapi dia berumur produktif dibelikan becak seharga Rp.550.000,00 oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) becak itu disuruh mengangsur 10 kali dengan besar angsuran Rp.57.000,00 perbulan. Dia mampu mengangsur selama 10 kali sampai dia memiliki becak sendiri untuk modal kerja, untuk menambah dan meningkatkan modal usahanya. Dia mempunyai hak untuk meminjam modal yang lebih besar lagi yaitu pinjam Rp.1.000.000,00 untuk membeli becak baru seharga Rp.1.000.000,00 diangsur 10 kali, perbulan angsurannya Rp.114.000,00. Dia sudah sudah dapat melunasi angsuran 10 kali untuk pinjam modal tahun ke-2 2005. Untuk pinjaman modal yang ke-3 tahun 2006 sudah berhasil melunasi angsuran 10 kali. Dia sudah berdaya, asalnya tidak mempunyai pekerjaan tidak mempunyai modal kerja sekarang sudah mempunyai becak 3 yang dipakai dia sendiri. Dua becak diantaranya dipakai oleh anaknya sendiri, yang 1 becak disewakan kepada orang lain. Pak Sariman sebelum menerima modal awal untuk membeli becak itu diberi bimbingan, dan arahan untuk mendayagunakan modal kerja dan supaya merubah kebiasaan yang jelek dari kebanyakan tukang becak yaitu berjudi dengan sesama tukang becak sehingga hasil uang hasil kerjanya habis untuk judi. Dia dibuatkan surat perjanjian penggunaan modal kerja.

Yang ke-2 adalah Ibu Haniah, seorang janda mempunyai anak perempuan satu. Dia termasuk keluarga miskin, pekerjaannya adalah buruh tukang border yang tidak punya mesin jahit sendiri tapi menyewa. Dia diberdayakan dengan pinjaman modal kerja untuk beli mesin manual (pancal) sebesar Rp.500.000,00 diangsur 10 kali yang setiap bulannya mengangsur Rp.57.000,00. Dia mampu melunasi angsuran selama 10 bulan. Dia meminta kepada BKM untuk dipinjami lagi modal kerja yang lebih besar lagi yaitu dipinjami yang ke-2 sebesar Rp.1.000.000,00 untuk dibelikan mesin juki yang pakai tenaga mesin dan diangsur 10 kali, angsuran perbulan sebesar Rp.114.000,00 lunas angsuran ke-2 tahun 2005. Terus tahun ke-3 diberdayakan lagi diberikan pinjaman modal sebesar Rp.1.000.000,00 diangsur 10 kali angsuran sudah lunas bulan desember 2006. Ibu Haniah sekarang sudah berdaya, dulu awalnya dia tidak mempunyai mesin jahit tapi sekarang sudah mempunyai mesin tiga, yang satu yang manual (pancal) dipakai sendiri, mesin yang ke-2 dipakai anaknya, mesin yang ke-3 disewakan kepada tetangganya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh dikelurahan lain di kecamatan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan.¹²

¹² Pengalaman penulis mendampingi masyarakat kair miskin di kelurahan-kelurahan yang ada di Kecamatan Bangil

PENUTUP

1. Kesimpulan

Kemiskinan, kemelaratan, kelaparan, dan ketidak berdayaan ekonomi masyarakat miskin merupakan bahaya besar bagi umat manusia. Ketidakberdayaan masyarakat miskin berbagai macam bidang kehidupan masyarakat, bidang pendidikan sangat lemah, di bidang politik, tidak dapat mengakses permodalan di lembaga keuangan, di kalangan masyarakat termarjinalkan di lingkungan masyarakatnya umat islam punya kewajiban untuk mengangkat harkat dan martabat kaum fakir dan miskin. Hal ini banyak peringatan yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Maun ayat 1 dan 3 dan hadits Nabi SAW. Kefakiran lebih mendekati pada kekufuran, tangan diatas lebih baik daripada tangan dibawah.

Untuk mengangkat harkat dan martabat dan menanggulangi masyarakat fakir dan miskin dengan strategi memberdayakan ekonomi masyarakat fakir dan miskin. Strategi pertama merubah mindset dari mental peminta-minta menjadi mental pengusaha atau interpreneurship. Kedua diberi wawasan dan pelatihan keterampilan usaha. Ketiga diberikan modal usaha sehingga mereka dapat menggunakan modal usaha dengan baik dan benar. Hal ini pernah digambarkan oleh Bank Dunia, seorang yang diberi modal usaha tanpa diberi pelatihan usaha dan penggunaan modal usaha sama dengan seorang petinju diberi Hasbook tanpa dilatih memukul dan sasaran pukulan jeep, pukulan huuk, dan pukulan KO dia tidak akan jadi petinju yang baik.

Dan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat miskin perlu pendamping yang professional yang ahli di bidang pemberdayaan masyarakat, dan interpreneurship, dan lain-lain yang selalu mendampingi masyarakat fakir dan miskin. Sehingga pemberdayaan masyarakat fakir dan miskin bias diatasi.

2. Rekomendasi

- a. Masalah pendanaan dalam penanggulangan kemiskinan agar diambilkan dalam zakat, infak, dan shodaqoh yang di kordinir oleh BAZ atau BAZIS di tiap-tiap daerah masing-masing yang selama ini dimanfaatkan unuk konsumtif, tidak untuk produktif .
- b. Orang fakir miskin yang akan diberdayakan dengan dana bergulir sebelum dana untuk modal usaha diberi tausiyah tentang dana bergulir dan tausiyah agama Islam tentang pemberdayaan umat Islam tentang ekonomi.
- c. Penanggulangan kemiskinan bisa dilakukan secara edukatif atau perorangan yang mempunyai skill pemberdayaan masyarakat miskin dan punya capital sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW.
- d. Penanggulangan kemiskinan bisa berjamaah dengan membentuk kelompok peduli dengan masalah kemiskinan.

Daftar Rujukan

Abdul Salam. *Pesantren Dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid*. Surabaya: Ciputra Interpreneurship, 2010.
Direktorat Jenderal Cipta Karya. *Pedoman Pelaksanaan Kegiatan*

- Direktorat Jenderal Perumahan Dan Permukiman. Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan
- Edi Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Adi Tama. 2013
- Kartini Kartono. *Patologi Sosial*. Pt Raja Grafindo. 1981
- Khoiriyah. *Sosiologi Pendidikan Islam*. Penerbit Teras. 2012
- Moh. Rifa'i, Moh Zuhri, Saloma. *Terjemahan Kifayatul Ahyar*. Cv Toha Putra. 1978
- Mushaf An-Nahdlah. *Al – Qur'an Dan Terjemah*. Pt Hati Mas. 2014
- Saiful Akhyar Lubis. *Konseling Islami*. Jakarta
- Syaikh Shafiyurrahman Al Mubarakfuri. *Siriah Nabawiyah*. Pustaka Al Kausar
- Wahyu. *Wawasan Ilmu Sosial Dasar*. Penerbit Usaha Nasional